

BAB 2 (Eka 6)

by Eka Yordan Sembiring



Submission date: 23-May-2018 09:58PM (UTC-0700)

Submission ID: 967964650

File name: BAB_II.doc (142.5K)

Word count: 9055

Character count: 60698

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Studi tentang pendidikan agama yang dilakukan oleh M. Musfiqon(2010) yang telah mengkaji Pendidikan Agama Islam di Sekolah Non Muslim: Studi Multi Kasus di Jawa Timur, menunjukan bahwa pendidikan agama Islam bisa diperoleh sekalipun di lembaga keagamaan non Muslim. Pelaksanaan yang sesuai dengan Sisdiknas ini merupakan gambaran ideal bagi pendidikan agama di Indonesia.

Fenomena di sekolah sekolah umum seperti sekolah agama seperti yang dinyatakan oleh Ifdhal “Pendidikan tentang keberagamaan dan toleransi beragama yang diberikan di sekolah-sekolah semakin terbatas. Bahkan, di sekolah-sekolah negeri kini cenderung menggunakan simbol-simbol agama tertentu dalam kegiatan sehari-hari. Hampir semua sekolah negeri sekarang seperti sekolah agama karena seluruh identitas agama dipakai di situ,” (Kompas, Selasa, 06 Oktober 2009).

Namun demikian kajian dari Kustini (2014) terkait dengan tidak adanya sistem yang baku tentang hak pendidikan agama Baha'i, nasib mereka bergantung kepada kecenderungan guru atau pimpinan sekolah, mereka bisa dimasukan ke agama apa saja bahkan hak pendidikan agamanya bisa ditiadakan. Dampak dari proses pembiaran ini akan mengaburkan agama

siswa, studi Robbayani menemukan bahwa teori-teori konvensional John Locke yang melukiskan jiwa anak seperti kaset yang kosong, merekam apa yang dilihat dan yang didengar. Siswa tersebut akan memutar kembali apa yang telah direkamnya, maka seharusnya diajarkan pendidikan agama sesuai agamanya.

Dalam perspektif hukum, Eka Yordan Sembiring (2009) mengkaji tentang Hak Pengajaran Anak Didik Beragama Advent Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada siswa Advent, bahkan memposisikan kelompok Advent sebagai orang luar. Agama Advent dipandang sebagai musuh pendidikan nasional dengan demikian, mereka ditempatkan pada pilihan pendidikan atau agama, menempuh pendidikan berarti kehilangan hak beribadah demikian sebaliknya.

Menelaah penelitian terdahulu, posisi penelitian ini adalah mencabar penelitian M. Musfiqon(2010) tentang Pendidikan Agama Islam di Sekolah Non Muslim: Studi Multi Kasus di Jawa Timur, menunjukkan bahwa disekolah swasta yang bernafaskan keagamaan bisa memberikan pendidikan agama sesuai yang dianut siswa. Praktek kebijakan sekolah non Muslim mampu memberikan pendidikan agama sesuai dengan Sisdiknas dan PP 55 Tahun 2007, dalam melengkapi tujuan pendidikan yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Tujuan pendidikan agama memerlukan pengetahuan dan pemahaman diri sebagai warga negara, bukan semata karena belas kasihan pengambil kebijakan.

Penelitian ini bukan saja substansi isu dan wacana seputar HAM tergolong aktual di Indonesia yang dihubungkan dengan sejarah panjang konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, tetapi penelitian ini menjadi menarik karena

menggunakan studi fenomenologi tentang pemahaman kelompok minoritas terhadap kebijakan penyelenggaraan pendidikan agama disekolah, studi fenomenologi kelompok dengan kelompok Advent di Pasuruan, hal ini disebabkan terbatasnya para pemelihara hari Sabat di kabupaten Pasuruan.

Pendekatan fenomenologi terhadap agama sebagaimana fenomenologi pada umumnya ditandai dengan tiga ciri, yakni *epoche*, *einfuhlung*, dan visi *editing vision*. *Epoche* adalah teknik penundaan atau bracketing sebagaimana dikenal dalam fenomenologi, yakni peneliti berusaha memahami realitas yang dihadapinya dengan menjauhkan sistem kepercayaan yang dimilikinya. *Einfuhlung* adalah curahan simpati yang lebih besar terhadap sistem internal saat realitas sosial diteliti. *Editing vision* merujuk pada praktek-praktik fenomenologi baik tipologi maupun morfologi (Momen, 1999:626). Dengan kacamata fenomenologi agama sebagai pendekatan metodologik terhadap studi agama yang sangat dipengaruhi oleh Edmund Husserl (1859-1938), pendekatan ini digunakan penulis sebagai komplemen terhadap sejarah agama. Baik sejarah agama maupun fenomenologi agama membentuk ilmu pengetahuan agama. Teori interaksionisme simbolis dalam agama memfokuskan pada proses bagaimana seseorang menjadi religius. Pendekatan interaksionisme simbolis menempatkan hari Sabat sebagai sesuatu yang suci dan dimuliakan dalam ibadah umat Kristen Advent yang digunakan untuk mempertahankan dan menjelaskan kehidupan. Dalam pendekatan fungsional, agama berada dalam alam pikiran manusia dan mempunyai pengaruh terhadap tindakan manusia, sifat *coercive* agama terletak pada sanksi-sanksi yang terdapat pada setiap norma agama. Sanksi-sanksi tersebut bersifat memaksa perilaku manusia, pemberi sanksi dalam norma agama adalah Tuhan. (Haryanto, 2015: 46,53,54). Pendekatan interpretif, Max Weber menekankan tumbuhnya

kecenderungan rasionalitas dalam agama. Studi Roger Finke dan Rodney Stark mengenai aliran-aliran agama, membuktikan bahwa pluralisme agama menurunkan keterlibatan dalam kegiatan keagamaan (Warner, 2005:636).

Melihat studi terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sekaligus menjadi sumber literatur dalam penelitian ini:

Hasil penelitian Akhmad Suaedy dkk, (2012) tentang Islam Dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer oleh Pemikiran menunjukkan Islam sebagai keimanan yang kuat dan menghegemoni, menjadi kelompok mayoritas dan menentukan dalam segala hal. Islam sebagai dasar negara, mendirikan negara Islam, tujuannya adalah kekuasaan, sehingga Islam menentukan setiap kebijakan negara. *Das sein* sejarah Islam menunjukkan toleransi, *das solen* menunjukkan permusuhan kepada non Muslim.

Inside minority rentan terhadap penindasan karena aliran dan pemikirannya menyimpang dari arus utama. Dipicu politik kekuasaan di dalam negara. Beberapa partai Islam dalam Pemilu 1955 dipermalukan kelompok - kelompok ini, karena hanya mendapat suara 42 persen. Mimpi buruk ini mendorong diterbitkannya UU No. 1 PS/1965 Tentang Larangan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Ruang kriminalisasi dan pembedaan terhadap kelompok aliran dibuka dengan memasukkan pasal 156a di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Fenomena tersebut bisa dilihat, hidup dinegara sekuler yang melindungi setiap individu dengan latar belakang agama berbeda, karena semata-mata status warga negara yang disandangnya merupakan pilhan terbaik bagi kelompok minoritas. Negara maupun kelompok mayoritas tidak mencampuri urusan agama warga negara.

Hasil penelitian Yogi Zul Fadhil (2014) tentang Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia, menunjukkan bahwa kelompok yang rentan jadi korban pelanggaran HAM seharusnya mendapat kehormatan dan perlindungan dari negara. Kebijakan negara seringkali memaksa kelompok minoritas untuk mengikuti kebijakan negara yang merugikan mereka, kerugian ini melingkupi kehilangan jati diri dan martabat sebagai sesama makhluk yang setara di dalam HAM. Di setiap negara kehadiran kelompok minoritas merupakan fakta dalam negara yang keberadaannya tidak dapat dinaifkan ditengah hegemoni kelompok mayoritas. Identitas yang berbeda dengan mayoritas merupakan makna yang secara jamak dimaknai sebagai minoritas, ditambah dengan jumlahnya yang sedikit membuat kelompok minoritas menjadi rentan terhadap diskriminasi. Identitas kelompok minoritas dijaga melalui solidaritas yang kuat diantara anggota kelompok mereka.

Minoritas didalam penelitian ini digambarkan sebagai kelompok yang dirugikan akibat diskriminasi terhadap mereka, anggota kelompok memiliki solidaritas yang kuat dan memandang diri mereka berbeda dengan yang lain. Terisolasi secara sosial dengan mayoritas karena identitasnya berbeda, sehingga kelompok minoritas ini hak hak yang dimilikinya rentan dicabut secara sewenang-wenang.

Secara hukum, hasil penelitian M. Syafi'ie (2011) tentang Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bahwa UU No . 1 / PNPS / 1 9 6 5 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama berdampak pada peniadaan hak beragama dan berkeyakinan bagi kelompok yang memiliki perbedaan penafsiran dengan Lembaga-lembaga agama resmi.

Agama tidak lagi menjadi hak asasi internal, tidak bisa dikurangi (non derogable rights) dan hanya urusan individu dengan Tuhannya, tetapi beragama dan berkeyakinan adalah otoritas dan ditentukan oleh negara, meyakini di luar ketentuan negara maka hak-haknya berarti dihilangkan. Data empiris menyatakan kelompok beragama mayoritas cenderung selalu tidak sepakat dan selalu menggunakan jalan kekerasan atas ketidaksepakatannya.

Hasil penelitian Ilham Mundzir (2012) tentang Negara, Hak-hak Minoritas, dan Multikulturalisme (Kasus Akhmadiyah) memberikan uraian bahwa negara belum bisa memenuhi hak-hak minoritas atau kelompok marjinal, Negara cenderung menciptakan politik kesesuaian dan membuat kebijakan rasialisme yang bertentangan dengan hak minoritas. Pemerintah bukan saja membiarkan kelompok minoritas tersebut mendapatkan diskriminasi dan rasisme melainkan juga secara hukum bermaksud membubarkannya. Pemerintah daerah juga mengikuti langkah ini dengan melarang warga Akhmadiyah tinggal diwilayahnya. Dalam penelitian ini setidaknya ada beberapa logika-logika yang dibuat, pertama karena warga Akhmadiyah telah menodai kelompok Islam lain yang lebih besar dan mayoritas. Solusinya adalah dibubarkan atau membentuk agama tersendiri. Kedua, Akhmadiyah dianggap mengangu keamanan dan stabilitas masyarakat, sebagai korban kekerasan malah dianggap provokator yang memicu agresi. Solusinya adalah pengusiran warga Akhmadiyah dari kampung halamannya. Kasus ini juga terjadi saat orde baru, komunitas Cina juga mendapatkan perlakuan yang sama. Seandainya Akhmadiyah kelompok mayoritas mungkin mereka tidak mengalami perlakuan rasisme seperti saat ini.

Secara sosiologis dan antropologis, ketika dua kebudayaan bertemu, maka proses yang ada hanya dua, asimilasi atau multikulturalisme. Asimilasi bermakna

bahwa "*heritage*" kebudayaan yang lebih kecil atau lemah harus meleburkan diri menjadi satu dengan kebudayaan yang lebih kuat, kalau perlu dengan kekerasan. Sedangkan multikulturisme pada dasarnya membiarkan kedua kebudayaan tersebut melestarikan *heritage*-nya masing masing sekaligus bertahan bersama sama di masyarakat. Akhmadiyah memiliki identitas dan ritual yang berbeda, sebagaimana perbedaan budaya keagamaan orang Muhammadiyah dengan orang Nahdatul Ulama. Hak hak Individu sangat berkaitan dengan hak-hak kelompoknya, bila hak hak kelompok terampas maka hak-hak individu juga terampas pula. Dalam tulisan ini menyatakan bahwa runtuhnya Yugoslavia dan komunisme Soviet memberikan hikmah bahwa suatu politik yang ingin melancarkan hegemonisasi atas keragaman sosial-kultural dibawah satu ideologi dan kekerasan politik justru akan menghasikan apa yang disebut sebagai "menabung dendam kultural". Elemen-elemen kolekti yang ditekan memberontak dan mendekonstruksi tatanan politik dan ideologi bersama itu.

Bukti empiris, kebijakan Eropa Barat dan Amerika yang menetapkan kebijakan multikulturalisme, kondisinya lebih baik, lebih demokratis dan lebih maju dibandingkan dengan negara yang menerapkan ideologi asimilasi.

Bangunan negara Indonesia melindungi semua agama dan melayani segenap pemeluknya dan pemenuhan hak-haknya, namun hasil penelitian Kustini (2014) tentang Agama Baha'i Problematika Pelayanan Hak-Hak Sipil, menunjukan fakta fakta dilapangan bahwa penganut agama minoritas mengalami banyak kesulitan didalam pelayanan hak hak sipil, dan hal ini menjadikan kontradiksi dengan sistem negara Indonesia yang menyatakan bukan berdasarkan negara agama, yang tidak dibangun atas agama resmi. Berdasarkan urusan administrasi kependudukan merupakan penghalang, dengan frasa " bagi

penduduk yang agama belum diakui sebagai agama”. Sehingga siswa penganut agama Baha’i didalam pelayanan pendidikan agama mengalami penolakan, dan mengalami ketidakpastian jenis agama yang dianut berdasarkan kolom “agama resmi negara” yang telah disediakan. Perbedaan kebijakan di masing-masing sekolah ini menyiratkan tidak adanya sistem baku terkait dengan hak pendidikan agama Baha’i, sehingga kebijakan yang diambil bergantung kepada kecenderungan guru atau pimpinan sekolah.

Sejarah pendidikan era Orde Lama dalam penelitian Edi Susanto (2009) tentang Pendidikan Agama Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia (Survey Historis Era Pemerintahan Soekarno) menunjukan bahwa siswa didalam mengikuti pendidikan agama bergantung kepada ijin orangtua bukan kewajiban yang ditetapkan oleh sekolah. Hal tersebut tertuang dalam UU No. 4/1950 atau UU No. 12/1954, memuat salah satu poin: Pendidikan Agama diberikan kepada kepada siswa dengan minimal 10 murid dalam satu agama. (Pasal 4, ayat 2), dengan waktu 2 jam setiap minggunya.

Ketetapan itu juga memberikan kepada pihak Kristen untuk membuat mata pelajaran tersendiri, karena secara hirarki mereka telah memiliki ahli agama yang mengenyam pendidikan akademis. lain dari peraturan baru ini juga menyebutkan bahwa gereja Kristen sudah mempunyai hirarki tersendiri dan mempunyai ahli agama yang berpendidikan akademis, sehingga pihak Kristen boleh menentukan pelajarannya sendiri.

Ketika Orde Lama, pendidikan agama tidak menentukan kenaikan kelas dan dilaksanakan dengan longgar, namun di era kepemimpinan Suharto diterapkan kebijakan sebaliknya. Sesuai hasil penelitian Samrin (2015) tentang Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia, menemukan

pendidikan agama merupakan salah satu dari tiga mata pelajaran wajib. Pendidikan agama merupakan komponen yang sangat menentukan perjalanan pendidikan nasional.

Studi tentang pendidikan agama yang dilakukan oleh M.Musfiqon(2010) tentang Pendidikan Agama Islam di Sekolah Non Muslim: Studi Multi Kasus di Jawa Timur, menunjukkan bahwa hak siswa beragama Islam di sekolah Katolik dan Protestan, dapat dipenuhi pendidikan agamanya.

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran cukup besar didalam menyusun disertasi, karena sebagai tambahan wacana dalam istilah sekolah dengan ideologi tertutup dan terbuka, dimana ideologi terbuka memberikan kesempatan kepada semua agama didalam memperoleh pendidikan agama, sedangkan istilah ideologi tertutup hanya terdapat pendidikan satu agama saja.

Pendekatan secara hukum dalam penelitian yang dilakukan peneliti (2009) tentang Hak Pengajaran Anak Didik Beragama Advent Dalam Perpektif Hak Asasi Manusia, menunjukkan bahwa bukan hanya hak pelajaran agama kelompok Advent yang dihilangkan, tetapi pelaksanaan ibadah sesuai agama yang dianutnya berada didalam tekanan dan intimidasi pihak sekolah. Kebijakan sekolah untuk kelompok Advent ditemukan bahwa hak beribadah dan hak mendapatkan pengajaran adalah saling eksklusif.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Konsep Pemahaman.

Pengetahuan akan pengalaman kelompok minoritas merupakan tahapan awal untuk kearah pemahaman. Pemahaman didefinisikan proses berpikir dan

belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami.

Menurut Benyamin S. Bloom pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan di ingat (Nasution, 1999). Dalam Taksonomi Bloom, pemahaman adalah kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Sedangkan pemahaman menurut Winkel (2009), kemampuan menangkap arti dari yang dipelajari. Pemahaman dalam pembelajaran adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hapal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.

Ranah kognitif menunjukkan adanya kemampuan progresif yang dicapai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, disimpulkan bahwa pemahaman merupakan kesanggupan dalam mendefinisikan serta memaknai teori maupun konsep yang dipelajari.

2.2.2 Kelompok Minoritas

Kelompok minoritas, secara logika adalah kelompok kecil yang kurang dari 50% di suatu wilayah. Status minoritas diberikan kepada kelompok yang jumlahnya kecil bila dibandingkan dengan suatu jumlah penduduk (Nasution,

2013). Definisi diatas menempatkan kelompok Advent di Pasuruan sebagai minoritas berdasarkan data yang tertera di bawah ini:

Tabel 2.1 Anggota jemaat Gereja Advent Kabupaten Pasuruan

Jemaat	Perempuan	Laki-laki	Siswa di sekolah umum	Tempat ibadah
Pasuruan	67	35	0	1
SLA Purwodadi	82	56	5	1
Sukorejo	63	36	3	1
Sumberwekas	51	38	9	1
Prigen	24	14	3	1
TOTAL	287	179	20	5

Sumber: Sekretaris Jemaat Gereja Advent se kabupaten Pasuruan 2017.

Perbandingan antara jumlah penduduk dengan kelompok Advent di kabupaten Pasuruan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perbandingan Penduduk dengan Anggota Kelompok Advent

Penduduk	Perempuan	Laki-laki	Total
Kab. Pasuruan	762.885 jiwa	747.376 jiwa	1.510.261 jiwa
Kelompok Advent	287 Jiwa	179 Jiwa	466 jiwa
Persentase (%)	0,04%	0,02%	0,03%

Sumber: Data akhir BPS Pasuruan tahun 2010.

Pengertian minoritas agama, dengan menggunakan optik ⁴ UU No. 1 PNPS

Tahun 1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama, minoritas dapat diartikan:

1) agama-agama yang penganutnya lebih kecil dari penganut agama mayoritas dalam hal ini Islam; 2) agama-agama di luar enam agama yang disebutkan secara eksplisit dalam UU ini; 3) aliran-aliran keagamaan yang berbeda dengan pandangan utama; 4) keyakinan/kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 5) dalam konteks indigenous people, adalah agama-agama yang dianut oleh masyarakat adat.

Berbagai macam istilah tentang minoritas, ini mengakibatkan penggunaan istilah minoritas dimaknai secara beragam. Istilah minoritas selalu merujuk pada kelompok atau komunitas yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan kelompok lain di suatu wilayah. Negara memberikan istilah untuk jumlah pemeluk agama yang sedikit dengan minoritas, bisa jadi didalam suatu provinsi atau kabupaten yang disebut minoritas disuatu tempat menjadi mayoritas ditempat berbeda. Secara umum, umat Islam selalu dianggap sebagai kelompok mayoritas apabila dibanding umat agama lain. Secara politik, umat Islam belum pernah menjadi satu kekuatan mayoritas, tapi dalam praktik berbangsa dan bernegara, negara selalu menempatkan umat Islam sebagai pengguna fasilitas pembangunan terbesar, dengan anggapan bahwa umat Islam adalah mayoritas.

2.2.3 Konversi Minoritas

Secara sosiologis, mereka yang disebut minoritas setidaknya memenuhi tiga gambaran. Pertama, anggotanya sangat tidak diuntungkan sebagai akibat dari tindakan diskriminasi orang lain terhadap mereka. Kedua, anggotanya memiliki solidaritas kelompok dengan “rasa kepemilikan bersama”, dan mereka memandang dirinya sebagai “yang lain” sama sekali dari kelompok mayoritas. Ketiga, biasanya secara fisik dan sosial terisolasi dari komunitas yang lebih besar (Terre, 2012).

Sejauh ini memang tidak ada definisi tunggal tentang minoritas. Umumnya hal ini lebih menekankan pada keberadaan minoritas sebagai persoalan fakta dan definisinya harus memasukan faktor-faktor objektif seperti fakta pluralitas

bahasa, etnis atau agama, dan faktor-faktor subjektif, termasuk bahwa individu itu harus mengidentifikasi dirinya sebagai anggota kelompok minoritas tertentu.

Pendefinisian ini mengalami hambatan, setelah melihat kondisi yang beragam di mana kelompok-kelompok tersebut tinggal. Sebagian hidup di tempat tertentu, terpisah dari populasi yang mayoritas. Tidak jarang ada hidup yang menyebar. Bisa jadi sebagian kelompok minoritas memiliki perasaan kuat tentang identitas kolektif dan ingatan sejarah mereka, namun yang lain justru hanya memiliki gagasan yang terfragmentasi dari warisan bersama mereka.

Menurut Francesco Capotorti(1977) minoritas agama adalah sebuah kelompok yang dari sisi jumlah lebih rendah dari sisa populasi penduduk suatu negara, berada dalam posisi tidak dominan, yang anggotanya menjadi warga negara suatu negara memiliki karakteristik agama yang berbeda dari sisi penduduk dan menunjukan, meski hanya secara implisit, rasa solidaritas yang diarahkan untuk melestarikan agama mereka.(Suaedy, 2012) Definisi itu merangkum dua kategori sekaligus. Kategori objektif berupa fakta kuantitas yang lebih rendah dari sisa populasi penduduk, sementara kategori subjektif rasa solidaritas sebagai komunitas minoritas.

Keberadaan minoritas dalam suatu masyarakat juga memiliki pengaruh terhadap kelompok mayoritas, sekalipun memerlukan waktu tertentu untuk menerima secara pribadi terhadap pandangan dan cara berpikir minoritas. Hal ini menyangkut bahwa pandangan mereka benar, minoritas berusaha meyakinkan mayoritas. Pencapaian ini bisa dilakukan dengan konsistensi dan fleksibilitas, ada pokok bahasan yang tidak prinsipil bisa dikompromikan, dengan demikian mayoritas beranggapan bahwa mereka moderat, bekerjasama dan rasional. Sebagai

hasilnya peluang mengubah pandangan mayoritas lebih terbuka (Mugny & Papastamou, 1980).

Sejumlah orang membuka hati untuk dan bergandengan tangan dengan pandangan dari minoritas dan menolak tekanan kelompok mayoritas. Pengaruh minoritas melibatkan penerimaan pribadi yang biasanya dalam bentuk informasi baru, gagasan baru yang membuka mata mayoritas dalam memeriksa kembali pandangannya selama ini.

Faktor penting bagi minoritas untuk mempengaruhi mayoritas (Moscovici, 1969) adalah perilaku yang konsisten terhadap pandangannya, kebenaran atas gagasan keyakinan yang telah ada, utuh dan tidak bias, melawan tekanan dan pelecehan. Pandangan mayoritas berubah saat minoritas berdiri pada posisi yang teguh dalam membela dan menyajikan posisi mereka secara konsisten.

2.2.4 Konsep Multikulturalisme

Indonesia merupakan negara yang majemuk penduduknya, secara geografis yang luas, dengan kehadiran kebudayaan Hindu dan Budha sangat kental, ditambah dengan kehadiran agama dari Timur Tengah yaitu agama Islam dan Kristen (Ichiyanto, 2005), mempengaruhi budaya Indonesia menjadi pluralisme.

Pluralisme merupakan bagian dari multikulturalisme, disamping rasa kebangsaan dan kebanggaan dalam mempertahankan kebhinekaan. Masyarakat multikulturalisme adalah tujuan bangsa Indonesia sesuai dengan konstitusi yang dibuat oleh bapak pendiri bangsa, yang ditopang oleh para pengambil kebijakan publik yang memenuhi unsur keadilan, para tokoh agama yang berwawasan nasional dan pendidikan masyarakat yang menerima keragaman keagamaan (M.

Atho Mudzar, 2005). Kekuatan bangsa bisa terwujud dengan disatukannya latar belakang bahasa, suku, etnik dan agama melalui penghargaan dan penghormatan atas hak sipil, tanpa terkecuali.

Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pemersatu bangsa, konsep multikulturalisme yang menerima kehadiran “yang lain” dengan kedudukan yang sederajat, sarana relasi, persamaan dalam hak dan kewajiban (Susi Fitri, 2005). Kerukunan umat beragama dalam wadah pluralisme agama, dengan tetap menjaga ajaran agama masing – masing secara spesifik. Pada lembaga pendidikan, nilai nilai pluralisme dan multikulturalisme diinternalisasi pada penyelenggaraan pendidikan agama agar tercipta keadilan sosial seperti diamanatkan oleh konstitusi.

Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah dengan melakukan langkah-langka seperti standarisasi ajaran-ajaran agama sesuai kebutuhan anak didik, memberikan peluang adanya guru agama yang berstatus pegawai negeri, mengembangkan rasionalisasi lembaga pendidikan berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan agama mulai dari kurikulum, pendanaan serta silabus program program.

Kurikulum pendidikan agama disekolah memasukan ideologi multikulturalisme dan pluralisme, hal ini diperlukan keberanian untuk berdialog dengan kelompok yang tidak setuju atas multikulturalisme. Perbedaan adalah suatu keniscayaan dan tidak perlu dipertentangkan, itu merupakan kenyataan hidup.

2.3 Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Agama

Prospektif pendidikan nasional selalu dihubungkan dengan hak asasi manusia dalam memperoleh pendidikan sangatlah tepat, sebab pada dasarnya perlindungan hukum menyangkut langsung terhadap penegakan Hak Asasi Manusia.

Dalam pasal 26 *Universal Declaration of Human Rights* ayat 2, tentang pendidikan dinyatakan:

Pendidikan ditujukan kearah perkembangan kepribadian manusia serta untuk memperkokoh penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar manusia. Pendidikan harus mempertinggi saling pengertian, toleransi dan persahabatan antara bangsa bangsa, ras dan kelompok keagamaan...

Indonesia sebagai negara hukum menjamin pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia , yang termaktub dalam konstitusi UUD 1945 perubahan keempat yang berbunyi:

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang- Undang.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dari pernyataan diatas pendidikan selalu dihubungkan dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia, merujuk kepada Amsal Sulaiman yang menyatakan:”Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan mengenal Yang Maha Tinggi adalah permulaan pengetahuan.”

Secara formil, orientasi nilai dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978 yang diperbaharui tahun 1999 tentang GBHN sebagai berikut:

Pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung-jawab atas pembangunan bangsa. Misi “perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, motivatif, berwawasan kebangsaan cerdas, sehat, berdisiplin, dan bertanggungjawab, berketrampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.

Misi pembangunan pendidikan disamping untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdimensi lain, menyangkut pembentukan akhlak mulia, sehat, disiplin dan bertanggung jawab, ini menunjukkan bahwa masalah pendidikan ada hubungannya dengan pembentukan kepribadian bangsa dan bukan semata-mata hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja.

Dalam GBHN tahun 1999-2004 pada kondisi yang melatar belakangi arah kebijakan bidang pendidikan dikemukakan bahwa: “di bidang pendidikan masalah yang dihadapi adalah berlangsungnya pendidikan yang kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik yang berakibat hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan”. Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa memang perlu adanya pembaharuan di bidang pendidikan, sebab masalah pendidikan ada kaitannya dengan makna hakiki kehidupan dan ini merupakan hak asasi manusia yang harus mendapatkan perlindungan. Dalam arah kebijakan Agama, GBHN 1999-2004 memuat:

- 1) Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama.
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam masalah transisi adanya Undang-Undang yang baru tentang sistem pengajaran nasional sebagai perwujudan amanat Undang Undang Dasar 1945, maka pelaksanaan sistem pendidikan nasional adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional pada konsideren menimbang dikemukakan:

Bahwa pembangunan nasional dibidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan dirinya baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Undang-Undang ini terdiri dari XX Bab meliputi 59 pasal dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 1989 oleh Presiden RI ditambah penjelasan. Termuat dalam Lembaran Negara RI tahun 1989 nomor 6. Menurut penjelasan Undang-Undang nomor 2 tahun 1989. UUD 1945 mengamanatkan melalui Bab XIII pasal 31 bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai "satu sistem pengajaran nasional". Sesuai dengan hal yang bersangkutan yaitu pendidikan, pengertian satu sistem pengajaran nasional dalam Undang-Undang Dasar diperluas menjadi satu sistem pendidikan nasional. Perluasan pengertian ini memungkinkan untuk tidak membatasi perhatian pada pengajaran saja, melainkan juga memperhatikan unsur-unsur pendidikan yang berhubungan dengan pertumbuhan kepribadian manusia Indonesia, yang

bersama-sama merupakan perwujudan bangsa Indonesia suatu bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan YME.

Pada perkembangan selanjutnya Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang sudah tidak kondusif lagi dan perlu diganti, sebagai penggantinya adalah Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia nomor 78 tahun 2003) yang terdiri dari XXII bab, 77 pasal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003 oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dalam konsideran menimbang antara lain dikemukakan:

bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 adalah wujud nyata dari perlindungan Hak Asasi Manusia atas pendidikan di Indonesia, sebagaimana dimuat dalam pertimbangan pembuatannya:

b) bahwa UUD Negara RI 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;

Jelas sekali menurut pertimbangan ini bahwa pendidikan dan peribadatan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, agar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak yang mulia dapat ditingkatkan.

Menurut Ketentuan Umum (Pasal 1) dalam Undang-Undang Sisdiknas ini yang dimaksud dengan:

- a) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan...akhlak mulia...
- b) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai keagamaan.

Ketentuan umum diatas mempunyai tujuan agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan akhlak mulia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian Pendidikan yang mengesampingkan peribadatan keagamaan bertentangan dengan ketentuan umum dari Undang-Undang Sisdiknas serta *Principles of Legality*. Dasar, fungsi dan tujuan Undang-Undang Sisdiknas termuat dalam pasal 3 berbunyi: Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia...

Iman dan Taqwa akan menjauhkan negara ini dari banjir kemerosotan yang telah mengerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam UU Sisdiknas no 20 tahun 2003, Prinsip penyelenggaraan pendidikan ini dapat dilihat pada pasal 4 : 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan...

Sesuatu yang prinsip adalah hal yang tidak boleh dilanggar, ini akan menimbulkan ketidakteraturan. Anak didik menurut pasal 4, tidak boleh dilarang/ditekan dalam Pendidikan Nasional (sekolah umum) berkenaan peribadatannya yang merupakan *freedom of worship* karena dijamin oleh pasal 29 UUD 1945 dan pasal 4 Sisdiknas yang merupakan prinsip dari Penyelenggaraan Pendidikan, dengan kata lain ini adalah darah dan roh dari Pendidikan itu sendiri.

Dalam Peraturan Menteri 2006, kurikulum pendidikan kristen dinyatakan sebagai berikut:

Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya untuk mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari peran agama amat penting bagi kehidupan umat manusia, maka internalisasi agama dalam setiap kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan, baik pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Pendidikan Agama dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengenalan, pemahaman dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. (Permendiknas no 22,23,24 Tahun 2006 untuk SD/MI).

Pasal 5 ayat 2) Warga negara yang memiliki kelainan...dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Sesuai dengan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Selanjutnya Pasal 11 ayat 1) menguatkan pasal 5 ayat 2) yang berbunyi: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan,

serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Pasal 12 ayat 1) menyatakan: Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik seagamanya.

Pasal diatas diadopsi dari teori *Receptio in Complexu* mengatakan, bahwa setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Penduduk yang beragama Islam berlaku baginya hukum Islam. Demikian juga hukum yang berlaku bagi pemeluk agama lainnya, sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. (Muchin, 2006:7)

2.4 Kelompok Minoritas Advent

Kebangunan rohani besar-besaran di Amerika dan terjadi kekecewaan besar dikenal peristiwa 22 Oktober 1844, sejak itulah munculnya sekelompok kecil orang yang tetap setia menantikan kedatangan Yesus Kristus ke dunia (Adventist). Kelompok kecil itu sangat rajin meyelidiki isi Alkitab, terutama buku Daniel dan Wahyu untuk menafsirkan hari kiamat dan kedatanganNya. Oleh yang kelompok kecil itulah kemudian yang meletakkan dasar-dasar kepercayaan Gereja Masehi Kristen Hari Ketujuh, dan organisasi yang telah disahkan tanggal 21 Mei 1863, yang pada awalnya hanya beranggotakan 3500 jiwa, tetapi kemudian setelah kurang lebih 140 tahun menjadi lebih 19 juta (Statistik GMAHK Juni 2016).

Pergerakan Gereja Masehi Kristen Hari Ketujuh (Seventh-day Kristenists) secara meluas berkembang di Amerika Utara hingga tahun 1874 sampai pada utusan misionari yang pertama, J.N. Andrews dikirim ke Switzerland.

Nama Masehi Advent Hari Ketujuh itu telah dipilih tahun 1860, dan secara resmi ditetapkan tanggal 21 Mei 1863 pada waktu mana sudah ada 125 jemaat yang bersatu dalam organisasi resmi gereja itu. GMAHK telah memasuki 204 negara di dunia. Pekerjaan penerbitan dan penjualan buku-buku merupakan faktor penting di dalam pertumbuhan dan pengembangan gerakan Advent itu. Rumah percetakan pertama GMAHK mulai beroperasi tahun 1855 di Battle Creek, Michigan, dan menjadi berbadan hukum tahun 1861 di bawah nama *Seventh-day Adventist Publishing Association*.

Jaringan pendidikan pertama mulai tahun 1872 dan Sekolah Sabat tahun 1877. Kantor pusat telah berpindah dari Battle Creek, Michigan ke Washington, D.C. tahun 1903, dan kemudian pindah lagi ke Silver Spring, Maryland tahun 1989.

2.4.1 Perkembangan dan Pembentukan GMAHK

Tahun 1850 kelompok-kelompok kaum Advent yang menyucikan Hari Sabat di New England dan New York telah bersatu dalam konferensi-konferensi di bawah kepemimpinan James White dan Istrinya Ellen White, serta Joseph Bates. Selama periode waktu tahun 1848 hingga tahun 1850, mereka telah membuat jelas perbedaan mereka dari anggota-anggota pergerakan Miller, dan mulai meletakkan garis-garis besar ajaran dasar gereja. Demikianlah terbentuk inti ajaran GMAHK beberapa tahun sebelum terbentuknya nama organisasi gereja itu tahun 1863.

Tentang nama lengkap Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh disingkat GMAHK, yang di dalam bahasa Inggris disebut, "Seventh-day Adventist" adalah merupakan sebuah nama resmi dari satu denominasi Kristen yang punya sifat

khas, dilengkapi dengan satu kegiatan keagamaan yang punya ajaran khusus, dimana pelajaran Hari Sabat dan ajaran Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia merupakan ciri utama gereja itu.

2.4.2 Organisasi dan Struktur GMAHK

Dalam struktur jemaat itu ditemukan satu sistem perwakilan organisasi di mana setiap jemaat memilih pegawai-pegawainya. Lebih lanjut struktur itu akan disimpulkan di bawah ini:

- 1) Jemaat setempat dijalankan oleh pegawai-pegawai yang dipilih jemaat antara lain, ketua atau ketua-ketua, deaken-deaken, sekretaris jemaat, bendahara-bendahara dan pimpinan departemen. Pendeta diangkat oleh konferens satu daerah (mission) setempat. Jemaat setempat bersama Konferens/Mission setempat dapat menjalankan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama dan statusnya sebagai Sekolah Gereja.
- 2) Konferens/Mission setempat terdiri dari jemaat-jemaat setempat dan bertanggung jawab untuk tugas jemaat dan evangelis di konferens.mission setempat. Pimpinan Konferens/Mission dipilih setiap 3 tahun oleh keputusan yang datang dari jemaat-jemaat. Konferens/Mission setempat dapat menjalankan Sekolah Lanjutan Atas berasrama. Konferens/Mission setempat mengangkat, dan memindahkan pendeta-pendeta yang akan melayani jemaat.
- 3) Uni Konferens (Union Conference) atau Union Mission terdiri dari beberapa konferens/mission setempat yang meliputi teritori tertentu. Konferens Uni/Mission menjalankan Perguruan-perguruan Tinggi dan Universitas di wilayah kerja Uni itu. Pimpinan Uni dan Direktur-direktur Departemen Uni dipilih untuk pelayanan selama 5 tahun.
- 4) Divisi terdiri dari dua atau tiga Konferens Uni/Mission yang mencakup satu teritori yang luas. Setiap divisi mengatur pekerjaan jemaat-jemaat di wilayah divisi itu. Pimpinan dan direktur departemen dipilih pada rapat umum yang dilaksanakan sekali 5 tahun di mana seluruh keputusan dunia turut menghadiri rapat umum itu. Tiap-tiap divisi mengangkat direktur-direktur departemen yang bertanggung jawab untuk pelayanan khusus, seperti departemen pendidikan dan komunikasi.
- 5) General Conference di mana divisi-divisi sebagai salah satu bagian, berfungsi untuk mengadakan koordinasi pekerjaan jemaat di seluruh dunia. Pimpinan dan direktur dipilih setiap 5 tahun pada rapat umum sedunia. Kantor pusat pelayanan jemaat untuk sedunia terdapat di Silver Spring, Maryland, Amerika Serikat.

2.4.3 Kepemimpinan GMAHK

Sebagai satu denominasi Kristen yang mengglobal, GMAHK dijalankan atas musyawarah sedunia yang disebut *General Conference*. Pengangkatan pimpinan tertinggi di kantor pusat sedunia diadakan setiap 5 tahun pada rapat akbar GMAHK yang dihadiri utusan yang datang dari lebih 200 negara, yang penyelenggaraannya diadakan di kota atau negara yang telah ditetapkan. Rapat akbar bulan Juli tahun 2005 diadakan di Minneapolis, AS. Pada tahun 1872 rumah percetakan Advent di Battle Creek, Michigan, menerbitkan sebuah “sinopsis kepercayaan kita” dalam 25 dalil.

Dokumen ini mendapat sedikit perbaikan dan perluasan menjadi 28 bagian, dimuat dalam buku *Yearbook* gereja tahun 1889, lalu tidak dicantumkan lagi untuk tahun-tahun berikutnya sampai tahun 1905 muncul kembali hingga tahun 1914. Untuk menjawab permohonan yang datangnya dari para pemimpin yang bertugas di Afrika, dengan alasan yang masuk akal, bahwa “sebuah pernyataan yang akan membantu para pejabat pemerintahan dan pemimpin lainnya, untuk memahami dengan sempurna mengenai pekerjaan kita”. Pernyataan ini terdiri dari 22 kepercayaan dasar yang pertama kalinya diterbitkan dalam *Yearbook* 1931, bertahan hingga tahun 1980 saat *General Conference* diadakan kembali membahas dan memperluasnya hingga 27 paragraf dan kemudian diterbitkan dengan judul “Kepercayaan Dasar Masehi Advent Hari Ketujuh.” Pada tahun 2005 ditambahkan menjadi 28 Dasar Kepercayaan dalam rapat *General Conference* Masehi Kristen Hari Ketujuh di St. Louis, Missouri, USA. Dengan menuliskan 28 kepercayaan pokok ini, Gereja mencoba memperlihatkan bagaimana orang-orang Advent memandang Allah. Dimana penulisan doktrin ini senantiasa dibimbing dengan jelas dan senantiasa mengingatkan kami akan pernyataan bahwa:

Jika engkau menyelidiki Kitab Suci hanya untuk mengukuhkan pendapatmu sendiri, engkau tidak akan pernah memperoleh kebenaran. Selidikilah Kitab Suci itu untuk mengetahui apa yang dikatakan Tuhan. Jika keyakinan timbul saat menyelidiki, jika engkau melihat bahwa pendapat-pendapat yang engkau anut tidak selaras dengan kebenaran, janganlah salah tafsirkan kebenaran hanya untuk menyesuaikan dengan keyakinanmu sendiri, melainkan terimalah terang yang diberikan dengan hati terbuka. Bukalah hati dan pikiranmu agar engkau melihat hal-hal yang menakjubkan yang keluar dari Sabda Allah. (White, 1900:112)

Kepercayaan Dasar Masehi Advent Hari Ketujuh ini bukanlah ² digunakan sebagai pernyataan keyakinan dalam perangkat kepercayaan konkret secara teologis. Pengajaran satu-satunya yang dianut orang Advent ialah: Alkitab, dan hanya Alkitab saja. Dari keduapuluh delapan doktrin Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, penulis hanya menyatakan secara singkat doktrin kehidupan Advent saja yang berhubungan dan sumber penelitian tentang Hari Sabat .

2.4.4 Keyakinan Dasar GMAHK: Hari Sabat

Hari Sabat adalah kata yang tidak asing bagi penganut agama Semawi: Yudaisme, Islam dan Nasrani, karena dalam kitab suci agama mereka tertulis dengan jelas, seterang sinar matahari di siang hari, dan selalu dihubungkan dengan Tuhan Pencipta langit dan bumi.

Hari Sabat merupakan patokan/standar dari satu minggu sama dengan tujuh hari yang berdasarkan penciptaan langit dan bumi selama enam hari, yang terdapat dalam Kitab Taurat. Bila patokan perhitungan bulan, itu jelas diambil dari waktu peredaran bulan mengitari bumi. Perhitungan satu tahun sama dengan 365 hari atau 12 bulan adalah waktu yang digunakan bumi untuk mengitari matahari. Perhitungan satu minggu sama dengan 7 (tujuh) hari adalah Firman Allah yang terdapat dalam Kitab Suci agama Semawi, tidak ada fenomena alam yang dapat dijadikan patokan atau standar lainnya.

Dalam agama Yudaisme, kitab pertama yaitu Kejadian menceritakan tentang penciptaan selama enam hari dan pada hari ketujuh Allah berhenti. Dan selanjutnya dalam Kitab Keluaran menceritakan tentang *The Ten Commandment* (Sepuluh Perintah) yang memuat tentang hari Sabat untuk dikuduskan dan disucikan dengan berhenti melakukan segala aktifitas duniawi. Selengkapnya berbunyi” ²Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat: enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu; maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu.

Di dalam Alquran, Surat Al-Baqarah 65-66 menyatakan sanksi bagi pelanggar hari Sabat, selengkapnya berbunyi:

Dan Sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran diantara kamu pada hari Sabat, lalu Kami katakan kepada mereka, ”Jadilah kamu kera yang hina!” Maka Kami jadikan (yang demikian) itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa.

Alasan mengapa hukuman begitu keras terdapat dalam kitab Keluaran 20:11 yang menyatakan: ²Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh; itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Pernyataan diatas dikuatkan kembali oleh kitab Alquran, dalam Surat Al-Araf 54 yang menyatakan: Sungguh, Tuhanmu (adalah) Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa... Surat An-Nisa 154 memberikan amaran: Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Kitab Yehezkiel 20:20 memberikan alasan tentang perlunya hari Sabat,

sebagai tanda antara Allah dan umatNya: Kuduskanlah hari-hari SabatKu, sehingga itu menjadi peringatan diantara Aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa Akulah Tuhan, Allahmu. Dalam kitab suci orang Nasrani, surat Ibrani 4:9 menambahkan: ² Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat Allah.

Pendapat umum dunia menyatakan bahwa hari Sabat itu adalah untuk orang Yahudi, dan pernyataan ini tidak didukung oleh satu ayat pun dari kitab-kitab Suci dari agama Semawi, kecuali oleh ahli tafsir dan para sarjana teologi. Pendapat bahwa hari Sabat untuk orang Yahudi bertentangan dengan pernyataan Isa Almasih dalam Injil Markus 2:27 yang tertulis: Hari Sabat diadakan untuk manusia. Bumi dan langit termasuk yang ada didalamnya yang dijadikan Allah dalam enam hari untuk manusia bukan untuk orang Yahudi saja. Hari Sabat adalah milik Allah dan merupakan monumen yang menyatakan bahwa langit dan bumi telah diciptakan Allah, serta hari Sabat diberkati dan dikuduskan oleh Pencipta alam semesta.

Dunia Kristen sekarang mayoritas berbakti pada hari Minggu, mengapa bisa terjadi demikian, alasannya harus dicari diluar Alkitab. Penulis disini hanya mau mengutip dua pernyataan, pertama oleh Kardinal Katolik, James Gibbons menulis sebagai berikut:

Anda dapat membaca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Anda tidak akan menemukan sebuah ayat pun yang menyatakan pengudusan hari Minggu. Justru Alkitab menekankan pemeliharaan hari Sabtu sebagai hari yang dipelihara agama. (John Murphy, 1895)

A.T. Lincoln, seorang Protestan, mengakui bahwa:

Tidaklah dapat dibuktikan bahwa Perjanjian Baru memberikan jaminan keyakinan bahwa sejak Kebangkitan, Allah menjadikan hari pertama itu

dipelihara sebagai hari Sabat.” Ia mengakui: “Menjadi pemelihara Sabat hari ketujuh satu-satunya arah tindakan yang konsisten bagi siapapun yang memegangnya, bahwa seluruh Sepuluh Hukum itu merupakan ikatan hukum moral.(D.A. Carson, 1982)

2 Allah memanggil umatNya supaya menjadikan hari Sabat itu sebagai hari kesukaan(Yesaya 58:13). Bagaimana mereka dapat berbuat demikian ini? Hanyalah jika mengikuti teladan Kristus, Tuhan hari Sabat, mereka dapat berharap mengalami kegembiraan yang sejati, dan kepuasan yang disediakan Tuhan pada hari ini. Kristus secara teratur mengikuti kebaktian pada hari Sabat, mengambil bagian dalam pelbagai pelayanan, dan memberikan petunjuk agama.(Markus 1:21:3:1-4)

Tiga tindakan Ilahi yang jelas dalam mendirikan Sabat itu:

Allah berhenti pada hari Sabat. Pada hari yang ketujuh Allah “berhenti bekerja untuk beristirahat” (Kel 31:17), namun demikian Ia beristirahat bukan karena Ia memerlukan (Yes 40:28). Kata kerja “beristirahat,” *Shabath*, secara harfiah berarti “berhenti” dari pekerjaan atau kegiatan (bandingkan Kej 8:22). “Allah berhenti bukan karena kelelahan atau capek, melainkan berhenti dari pekerjaan yang lebih dahulu. (SDA Bible Commentary, jilid 1:220).

2 Allah beristirahat karena Ia ingin manusia beristirahat; Ia membuat contoh untuk diikuti manusia (Keluaran 20:11). Jika Allah telah selesai mengadakan Penciptaan pada hari keenam (Kejadian 2:1), apakah yang dimaksud Kitab Suci tatkala mengatakan bahwa Ia “menyelesaikan pekerjaan yang dibuat-Nya itu” pada hari yang ketujuh (Kejadian 2:2) Allah telah selesai mencipta langit dan bumi di dalam enam hari, tetapi toh Ia masih menjadikan hari Sabat. Sabat dijadikan untuk hari beristirahat. Hari Sabat sebagai penyelesaian akhir, maka Ia mengakhiri karya-Nya.

- 1) Allah memberkati hari Sabat. Allah tidak hanya menjdikan hari Sabat, tetapi Ia juga memberkatinya. “Dengan diberkatinya hari ketujuh itu,

berarti itulah yang menyatakan sebagai hal yang khusus diperkenan Ilahi dan merupakan hari yang mendatangkan berkat bagi makhluk yang diciptakan-Nya.”(*SDA Bible Commentary*, jilid 1:220).

- 2) Allah menyucikan Sabat. Arti menyucikan ialah membuatnya kudus dan suci, atau mengasingkannya sebagai sesuatu yang suci dan digunakan untuk maksud-maksud yang kudus saja, menahbiskannya. Khalayak, tempat-tempat (misalnya kaabah, gereja atau tempat kebaktian), dan waktu (hari-hari yang kudus) dapat disucikan. Kenyataan bahwa Allah menguduskan hari ketujuh berarti bahwa hari itu memang kudus, bahwa Ia menjadikannya khusus untuk tujuan yang luhur untuk memperkaya hubungan manusia-Ilahi.

Allah memberkati dan menguduskan Sabat hari ketujuh karena Ia beristirahat pada hari ini dari semua pekerjaan-Nya. Ia memberkati dan menguduskannya bagi umat manusia, bukan hanya untuk diri-Nya sendiri. Hanyalah dengan kehadiran-Nya berkat Allah dan pengudus-Nya dapat berlangsung.

2.5 Landasan Teori

2.5.1 Teori Fenomologi

3 Fenomenologi adalah salah satu pendekatan sosiologis dalam memahami suatu peristiwa atau fenomena dengan pendekatan ini peneliti berusaha untuk masuk lebih dalam dengan memahami respon pertama dari individu dalam memaknai peristiwa tersebut. Kehidupan sosial adalah hal yang dipaksakan oleh elemen dari luar/eksternal peristiwa tidak berjalan sendiri tapi sangat dipengaruhi oleh struktur-struktur eksternal di sekitar individu seperti keluarga, sekolah, lingkungan dll seperti yang dipahami oleh teori struktural, tapi kita

yang membentuk kehidupan kita sendiri. Individu melakukan sesuatu karena mereka bebas untuk melakukan atau membentuk kehidupan sosial mereka, bukan karena paksaan tapi karena *freewill* atau kebebasan berkehendak atau memilih, individu itu sendiri yang membangun konstruksi tersebut, jadi kita memiliki pilihan untuk memilih dan membentuk konstruksi sosial atau kehidupan kita sendiri. Namun teori fenomenologi lebih memusatkan perhatiannya pada individu tersebut dan mengesampingkan

struktur lain. Individu bebas untuk berkehendak dan memutuskan untuk melakukan suatu kegiatan dan berhak untuk menciptakan kehidupannya sendiri tanpa ada paksaan atau dorongan dari pihak lain

Ketika hendak memahami suatu peristiwa dengan menggunakan pendekatan fenomenologi ini, peneliti hanya menfokuskan diri pada subjek tersebut, kenapa mereka mau melakukan itu, bukan apa yang mempengaruhi individu untuk melakukan hal tersebut dan berusaha melihat dari sudut pandang pelaku, yaitu bagaimana pelaku memaknai peristiwa tersebut dan apa kepuasan yang didapat ketika si individu melakukan hal tersebut.

Seorang ilmuwan sosial, dalam hal ini, tidak lebih tahu dari pada para pelaku dalam dunia sosial itu. Oleh karena itu, dengan cara tertentu ia harus masuk ke dalam dunia kehidupan yang unsur-unsurnya ingin ia jelaskan itu. Dalam usaha menjelaskan, ia harus memahaminya dan untuk memahaminya, ia harus dapat berpartisipasi ke dalam proses yang menghasilkan dunia kehidupan itu.

³ Fenomenologi tidak luput dari berbagai kelemahan. Tujuan fenomenologi untuk mendapatkan pengetahuan yang murni objektif tanpa ada pengaruh berbagai pandangan sebelumnya, baik dari adat, agama, ataupun ilmu

pengetahuan, merupakan sesuatu yang absurd. Sebab fenomenologi sendiri mengakui bahwa ilmu pengetahuan yang diperoleh tidak bebas nilai (*value-free*), tetapi bermuatan nilai (*value-bound*).

Penelitian selalu mempertimbangkan implikasi filosofis status pengetahuan.

Secara jujur dapat dikatakan, kurang objektivitas atau penelitian bebas nilai, yang ditafsirkan secara subjektif dan oleh karenanya status seluruh pengetahuan adalah sementara dan relatif dan akibatnya hasil penelitian fenomenologi tidak pernah terwujud.

Fenomenologi memberikan peran terhadap subjek untuk ikut terlibat dalam objek yang diamati, sehingga jarak antara subjek dan objek yang diamati kabur atau tidak jelas. Pengetahuan atau kebenaran yang dihasilkan memiliki kecenderungan subjektif, berlaku pada kasus tertentu, situasi dan kondisi tertentu, serta dalam waktu tertentu, pengetahuan atau kebenaran yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasi.

2.5.2 Teori Habitus

Bourdieu (George Ritzer, 2004) merumuskan konsep habitus sebagai analisis sosiologis dan filsafati atas perilaku manusia. Habitus adalah nilai-nilai sosial yang dihayati oleh manusia, dan tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap di dalam diri manusia tersebut. Habitus seseorang begitu kuat, sampai mempengaruhi tubuh fisiknya. Habitus yang sudah begitu kuat tertanam serta mengendap menjadi perilaku fisik disebutnya sebagai Hexis.

Seorang penganut gereja masehi advent hari ketujuh yang ortodhok. Sejak kecil sudah diajarkan untuk berbakti setiap hari Sabat (Sabtu). Setiap hari diajarkan untuk membaca dan mempelajari Alkitab, sering diajak untuk membaca buku buku tulisan Ellen. G. White yang berisi tentang tata cara sebagai seorang pemeliharaan hari Sabat. Dari kehidupan kakek nenek dan orangtua bahkan pendiri dan tokoh tokoh kelompok Advent selalu menghindarkan pekerjaan atau urusan duniawi setiap hari Sabat (Sabtu).

Pada acara kebaktian digereja selalu diajarkan untuk berdiskusi, atau menyatakan cara pandang didalam menyingkapi setiap topik yang dibahas, sekalipun berbeda pandangan dengan tokoh agama yang mengajarnya.

Sudut pandang teori Bourdieu tentang habitus, orang yang demikian sudah memiliki habitus yang tepat untuk menjadi penganut kelompok Advent. Habitus tersebut diperoleh dari penghayatan nilai-nilai yang ada di lingkungan kelompok Advent, yang kemudian mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang dihayati sebagai manusia.

¹ Habitus berbeda-beda pada setiap orang tergantung pada wujud posisi seseorang dalam kehidupan sosial; tidak setiap orang sama kebiasaannya; orang yang menduduki posisi yang sama dalam kehidupan sosial, cenderung mempunyai kebiasaan yang sama. Habitus lebih didasarkan pada keputusan impulsif, dimana seorang individu bereaksi secara efisien dalam semua aspek kehidupan. Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh kehidupan sosial. Pada satu pihak habitus adalah sebuah struktur yang menstruktur kehidupan sosial. Pada ¹ lain habitus adalah struktur yang distruktur oleh dunia sosial. Habitus menjadi

konsep penting baginya dalam mendamaikan ide tentang struktur dengan ide tentang praktek dan berusaha mengkonsepkan kebiasaan dalam berbagai cara, yaitu: sebagai kecenderungan-kecenderungan empiris untuk bertindak dalam cara-cara yang khusus (gaya hidup), sebagai motivasi, preferensi, cita rasa atau perasaan (emosi), sebagai perilaku yang mendarah daging, sebagai suatu pandangan tentang dunia (kosmologi), sebagai keterampilan dan kemampuan sosial praktis, sebagai aspirasi dan harapan berkaitan dengan perubahan hidup dan jenjang karier. Habitus membekali seseorang dengan hasrat. Motivasi, pengetahuan, keterampilan, rutinitas dan strategi untuk memproduksi status yang lebih rendah. Bagi Bourdieu keluarga dan sekolah merupakan lembaga penting dalam membentuk kebiasaan yang berbeda.

Habitus menempati fungsi-fungsi sebagai [a] *Matrix of Perception*; Habitus merupakan batu pijakan seseorang dalam berfikir atau mempersepsikan sesuatu, juga sebagai titik tolak dan berlabuhnya proses mempersepsikan sesuatu berdasarkan latar belakang agen (sejarah). [b] *Appreciation*; Habitus menjadi titik tolak dan menentukan bagaimana seseorang mengapresiasi atau cara pandang terhadap sesuatu. [c] *Action*; Habitus merupakan basis bagi individu untuk melakukan aksi. Tiga hal tersebut merupakan cerminan dari Habitus. Contoh; bagi seorang siswa kelompok Advent mustahil memberi apresiasi terhadap ibadah yang dilakukan penganut protestan pada hari minggu. Ketika seorang siswa Advent yang ¹ hampir tidak pernah mengakses informasi mencoba mempersepsi atau memikirkan tentang seorang yang sedang menonton Televisi pada hari Sabtu merupakan orang Advent yang tidak taat, meskipun tontonan yang dilihat itu dari saluran gereja Advent sendiri. Berbeda halnya dengan seorang Advent di kota besar, seperti Jakarta, mereka menonton televisi setiap hari Sabat merasa nyaman

sepanjang siaran yang ditayangkan berasal dari Gereja Advent. ¹ Setiap orang mempunyai kecenderungan berbeda-beda dalam mempersepsi, mengapresiasi dan melakukan aksi, tergantung latar belakang sejarahnya dan karaternya. Hal ini berdasarkan bahwa habitus setiap orang cenderung berbeda-beda. Sehingga dengan adanya heterogenitas habitus ini maka dimungkinkan adanya perluasan-perluasan habitus, antar habitus saling bergesekan, mencerpai dan merebutkan makna dan mengidentifikasi diri dengan habitus yang sama dan habitus yang berbeda. Jika habitus tersebut menemukan habitus-habitus lain yang identik mereka akan membentuk habitus kompleks, atau kelas. Demikian Bourdieu melihat habitus sebagai faktor penting yang berkontribusi untuk reproduksi sosial karena merupakan pusat untuk menghasilkan dan mengatur praktik yang membentuk kehidupan sosial. Individu belajar untuk menginginkan apa kondisi memungkinkan bagi mereka, dan tidak untuk bercita-cita apa yang tidak tersedia bagi mereka. Kondisi di mana kehidupan individu menghasilkan disposisi kompatibel dengan kondisi ini (termasuk selera dalam buku, makanan, dan musik), dan dalam arti pra-disesuaikan dengan tuntutan mereka.

2.5.2.1 Doxa dan Habitus

Kelompok Advent meyakini bahwa hari Sabat merupakan Doxa, yaitu ¹ kepercayaan dan nilai-nilai tak sadar, berakar mendalam, mendasar, yang dipelajari (*learned*), yang dianggap sebagai universal-universal yang terbukti dengan sendirinya (*self-evident*), yang menginformasikan tindakan-tindakan dan pikiran-pikiran seorang agen dalam ranah (*fields*) tertentu.

Doxa cenderung mendukung pengaturan sosial tertentu pada ranah tersebut, dan dengan demikian mengistimewakan pihak yang dominan dan menganggap posisi dominan tersebut sebagai terbukti dengan sendirinya (*self-evident*) dan lebih disukai secara universal (*universally favorable*). Karena itu, kategori-kategori pemahaman dan persepsi yang membentuk habitus, yang selaras dengan organisasi obyektif dari ranah bersangkutan, cenderung untuk mereproduksi struktur utama dari ranah tersebut.

Maka Bourdieu melihat habitus sebagai kunci bagi reproduksi sosial karena ia bersifat sentral dalam membangkitkan dan mengatur praktik-praktik yang membentuk kehidupan sosial. Individu-individu belajar untuk mendambakan hal-hal yang dimungkinkan bagi mereka, dan tidak mengaspirasi hal-hal yang tidak tersedia bagi mereka.

Kondisi-kondisi di mana individu hidup membangkitkan disposisi-disposisi (kecondongan) yang cocok dengan kondisi-kondisi tersebut (termasuk selera pada buku, makanan, dan musik), dan dalam arti tertentu mem-pra-adaptasi terhadap tuntutan-tuntutan dari kondisi tersebut. Praktik-praktik yang paling tidak dimungkinkan dengan demikian disisihkan, sebagai hal-hal yang tak terbayangkan, lewat semacam ketundukan segera terhadap tatanan tertentu. Tatanan tersebut membuat agen-agen condong untuk mengerjakan sesuatu dengan suka hati, yaitu untuk menolak apa yang secara kategoris memang tertolak, dan untuk menghendaki hal-hal yang memang tak terhindarkan.

2.5.2.2 ¹ *Capital* (Modal)

Usaha Bourdieu (George Ritzer, 2004) dalam menjadikan struktur dan agensi sebagai dualitas, selain tidak bisa dilepaskan dari konsepnya tentang habitus, juga konsepnya tentang capital yang masih berkaitan erat dengan konsep habitus. Berbeda dengan konsep capital-nya Marxian yang cenderung bersifat materialistik dan determinasi ekonomi yang kemudian menerbitkan pertentangan kelas, Bourdieu tidak membatasi capital pada ekonomi. Menurutnya ada empat macam capital/modal. Yakni modal ekonomi (uang, harta benda, kepemilikan dll.), modal kultural/budaya (modal informasi, pendidikan, keterampilan dll.), modal simbolis (agama, kharisma dll.).

Modal-modal tersebut tidak bersikap tertutup, memungkinkan antara modal satu dengan modal lainnya saling bersentuhan, menegasi, menghadirkan modal lainnya. Di antara empat modal tersebut, menurut Bourdieu, yang mempunyai posisi penting dan paling berpengaruh yakni modal ekonomi. Dalam keterkaitannya dengan habitus, modal memiliki peran yang penting. Dalam diri seseorang, modal selalu hadir bersamaan dengan habitus. Seperti sedikit disinggung di atas bahwa pergulatan resiprokal antar habitus dengan struktur yang dibarengi keikutsertaan agensi yang tidak begitu saja patuh kepada struktur.

Agen selalu berusaha untuk kreatif, memetakan strategi untuk mengimprovisasi. Di situlah empat modal tersebut mempunyai posisi yang penting, menjadi bagian dari pergulatan agensi. Bourdieu menganggap bahwa modal memainkan peranan yang penting, karena modal adalah yang memungkinkan orang untuk mengendalikan orang untuk mengendalikan nasibnya sendiri maupun nasib orang lain.

2.5.2.3 ¹ Arena (*Field*)

Istilah *Field* sering dipakai Bourdieu untuk menyatakan suatu arena sosial tempat bercengkramanya habitus-habitus yang didalamnya terdapat berbagai perjuangan dan manuver antar habitus dalam memperebutkan makna, sumber daya, mengungguli, mencari pengakuan, memosisikan diri dsb. *Field* bisa kita lihat dalam beberapa ruang simbolik dalam level makro: Negara, Dunia Agama, Ekonomi, Universitas, Sunda, Jawa dsb. Dalam level mikro: ADRA, BWA, Fakultas Kependetaan, SLAPUR, dsb. ¹

Semuanya adalah arena perjuangan antara habitus dengan habitus lainnya. Agensi ketika menghadapi *field* tertentu harus mengetahui kode-kode dan aturan yang sudah berkembang di dalamnya. *Field* bagi Bourdieu lebih bersifat relasional ketimbang struktural. *Field* adalah jaringan hubungan antar posisi obyektif di dalamnya. Keberadaan hubungan ini terlepas dari kesadaran dan kemauan individu. *Field* bukanlah interaksi atau ikatan lingkungan bukanlah intersubjektif antara individu.

¹ Arena menurut Pierre Bourdieu adalah jaringan relasi antar posisi subyektif yang keberadaan relasi-relasi ini terpisah dari kesadaran dan kehendak individu. Relasi tersebut, bukan intersubjektif antar individu yang menduduki posisi, bisa jadi harapan agen atau institusi itu terhambat oleh struktur arena itu sendiri. Bourdieu melihat arena sebagai lahan pertempuran dimana arena juga merupakan arena perjuangan yang menopang dan mengarahkan strategi yang digunakan oleh orang-orang yang menduduki posisi ini untuk berupaya baik individu maupun

kolektif, mengamankan atau meningkatkan posisi mereka dan menerapkan prinsip hierarkisasi yang paling cocok untuk produk mereka.

Di sisi lain arena juga merupakan hal yang sejenis dengan pasar kompetitif yang di dalamnya berbagai jenis modal (ekonomi, cultural, social, simbolik) yang digunakan dan dimanfaatkan, namun adalah arena kekuasaan (politik) yang paling penting. hierarki hubungan kekuasaan dalam arena politik berfungsi menstrukturkan semua arena lain. Sehingga menurut Bourdie modal adalah segala aspek kebutuhan yang harus dimiliki dan diusahakan oleh setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya baik fisik maupun biologisnya.

Posisi dari berbagai agen di arena tersebut ditentukan oleh jumlah dan bobot relative modal yang mereka kuasai. Bourdie bahkan juga menggunakan gambaran militer untuk menggambarkan arena dengan menyebutnya penempatan dan pendudukan strategis yang harus dipertahankan dan dikuasai di arena pertempuran. Adalah modal yang memungkinkan orang mengendalikan nasibnya sendiri maupun nasib orang lain.

Dalam ranah ekonomi, modal ekonomi cenderung berupa insentif, modal cultural terdiri dari berbagai pengetahuan yang legitim, modal social terdiri dari hubungan social bernilai antar orang sedangkan modal simbolis tumbuh dari harga diri dan prestise. Orang yang menduduki posisi dalam arena tersebut menjalankan berbagai macam strategi. Gagasan ini menunjukan *actor* dalam pemikiran Bourdie paling tidak memiliki sedikit kebebasan dimana habitus tidak menegaskan kemungkinan kalkulasi strategi dari pihak agen, namun strategi tidak merujuk pada dijalankannya secara aktif alur tindakan yang berorientasi obyektif

yang mematuhi regularitas dan membentuk pola-pola kehendak yang dapat dipahami secara rasional.

Boudieu juga melihat bahwa Negara sebagai lahan perjuangan untuk meraih monopoli dari apa yang diselewengkannya sebagai kekerasan simbolis. Ini adalah bentuk kekerasan yang halus, kekerasan yang dijalankan oleh agen social dengan kompleksitasnya (Bourdieu dan Wacquant, 1992 : 167). Dalam gagasan inilah aspek politis karya Bourdieu terlihat jelas. Jadi Boudieu tertarik pada emansipasi orang dari kekerasan ini dan lebih umum lagi dari dominasi kelas dan politik.

Bourdieu menyusun 3 langkah proses untuk menganalisa lingkungan, pertama, menggambarkan keutamaan lingkungan kekuasaan (politik). Langkah kedua, menggambarkan struktur obyektif hubungan antar berbagai posisi di dalam lingkungan tertentu, ketiga, analisis harus mencoba menentukan ciri-ciri kebiasaan agen yang menempati berbagai tipe posisi di dalam lingkungan.

Dengan kata lain, *Field* adalah wilayah kehidupan sosial, seperti seni, industri, hukum, pengobatan, politik dan lain sebagainya, dimana para pelakunya berusaha untuk memperoleh kekuasaan dan status. Dalam menegaskan arti penting habitus dan arena, ia tidak mau membedakan individualisme metodologis dengan holisme metodologis. Dia memilih pandangan yang disebut dengan relasionisme metodologis yang pada intinya bahwa ia lebih memperhatikan hubungan antara habitus dengan arena. Ia melihatnya dengan 2 cara. Di satu sisi arena mengkondisikan habitus sedangkan disisi lain habitus menciptakan arena sebagai sesuatu yang bermakna yang memiliki rasa dan nilai dan yang layak untuk mendapatkan strategi energi. *Habitus*, *capital* dan *Field* saling

berhubungan. Berdasarkan uraian di atas bahwa habitus yang merupakan sebuah proses menginternalisasi kesejarahan, dan merupakan basis generatif dalam praksis (persepsi, apresiasi dan aksi) agensi.

Habitus menempatkan posisi *capital* sebagai hal yang penting, *field* yang juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan habitus, selalu memasang *capital* sebagai bagian dari dirinya yang penting. *Capital*, bagi habitus, menjadi bagian dari pergulatan pertautan antar habitus, *field* dan strategi-strategi serta segala bentuk reproduksi. Dalam habitus selalu menempel *capital* dalam proses pergulatannya, *capital* menubuh dalam habitus. Berdasarkan *Capital*, habitus dapat melakukan kreasi-kreasi yang pada saat bersamaan berhadapan dengan *field* atau struktur.

¹ Habitus merupakan basis generatif dari praksis (persepsi, apresiasi dan aksi), maka pertautan antara habitus, *capital* dan *field* memberikan cerminan untuk lahirnya praksis. [(habitus) (*capital*)] + *field* = *practice*]. *Field* terdiri dari ¹ berbagai rupa habitus. *Field* merupakan antar habitus-habitus saling bersinggungan, saling berusaha memosisikan diri, saling berjuang memperebutkan makna. Habitus-habitus tersebut cenderung heterogen dalam menyandang modal. Ada yang lebih kaya, cukup kaya, miskin. Ada yang memiliki status sosial tinggi, menengah dan rendah, ada yang memiliki intelektualitas tinggi dan banyak hal lagi. *Field* tersebut merupakan modal tersebut akan menyusut, berubah, bertumbuh, dan memunculkan modal lain, juga sebagai pijakan strategi improvisasi praktis. Berdasarkan *field*, bagi habitus yang mempunyai modal yang lebih tinggi akan mendominasi, lebih mudah mendapatkan makna, dan lebih mudah mendapat pengakuan. Karena *field*

cenderung heterogen, dalam setiap *field* mempunyai kode-kode dan aturan tersendiri.

Modal yang menentukan seseorang mendapatkan makna dalam *field-field* tersebut akan berbeda dalam satu *field* dengan *field* lainnya. Modal memungkinkan banyak mencerna bacaan (modal cultural) di Formasi (*field*) cukup menentukan bagi seseorang untuk mendapat pengakuan, mendominasi orang lain, namun berbeda ketika orang tersebut terjun dalam majelis gereja, orang tersebut akan mendapat pengakuan dan mendominasi orang lain ketika dia taat beribadah (modal simbolik). Juga, di dalam *field*, antar beberapa habitus saling mengidentifikasi diri, mereka akan menemukan kesamaan modal, kepentingan, makna, persamaan dalam bertindak, mempersepsi dan aksi dsb, dengan habitus lainnya. Maka mereka dengan secara sadar maupun tidak sadar akan membentuk kelas.

Bourdieu memetakan masyarakat ke dalam dua dimensi. Pertama: masyarakat tersusun menurut —dimensi vertikal, antara mereka yang kaya modal, baik mereka yang kaya modal ekonomi, kultur, sosial, maupun simbolik, dengan yang miskin atau sepi modal. Kedua: dimensi —struktur modal, maksudnya dalam *field* yang berbeda-beda, maka modal yang menentukan juga berbeda, seperti contoh di atas.



BAB 2 (Eka 6)

ORIGINALITY REPORT

34%

SIMILARITY INDEX

34%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

socialmasterpice.blogspot.com

Internet Source

19%

2

gmahkbintaro.com

Internet Source

7%

3

himasio-unsyiah.blogspot.com

Internet Source

4%

4

wahidinstitute.org

Internet Source

4%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 3%

Exclude bibliography

On